



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**LAPORAN**

**KINERJA**

**2022**

**2022**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Perwakilan Provinsi Lampung





# Nilai dan Budaya Kerja 2020 - 2024





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam penyusunannya, telah memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan ditandatangani pada bulan Januari 2022 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Lampung dalam tahun 2022. Laporan ini juga merupakan salah satu alat dalam menilai dan mengevaluasi capaian kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Lampung, atas seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022. Kemudian, Perwakilan Provinsi Lampung juga melakukan menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif dengan kondisi terkini. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung tetap melaksanakan protokol kesehatan, memantau kesehatan dan keselamatan pegawai serta telah memfasilitasi pemeriksaan dengan diadakannya rapid test sebelum dan setelah pemeriksaan melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksaan dengan perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti obat-obatan, masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan *face shield*.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi riil pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Lampung sesuai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.





Penyajian Laporan Kinerja ini menjadi cermin bagi kita semua dalam upaya mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, dengan tujuan kinerja ke depan dapat dilaksanakan secara lebih produktif, efektif, dan efisien. Semoga laporan ini dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung kedepannya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023

Kepala Perwakilan Provinsi  
Lampung,

f. Yusnadewi



# DAFTAR ISI

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Lampung
- C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- E. Isu Strategis

## **BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

- A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung

## **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

- A. Hasil Evaluasi AKIP
- B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- C. Analisis Efisiensi
- D. Perubahan Budaya Kerja
- E. Realisasi Anggaran
- F. Inovasi
- G. Penghargaan

## **BAB 4 PENUTUP**

## **LAMPIRAN**



# BAB 1



# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga pada unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 yang menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

## B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana diatur pada Pasal 510 Peraturan BPK RI nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada



Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se-Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, baik yang





pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun pemeriksa yang bekerja untuk/dan atas nama BPK;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BP Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.



## C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG



**Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung**

Sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Tortama KN V yang terdiri dari:

### 1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

### 2. Subauditorat Lampung I

Subauditorat Lampung I mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, serta BUMD dan Instansi terkait di lingkungan entitas untuk:





- 1) merumuskan rencana kegiatan;
  - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  - 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Lampung.

### 3. Subauditorat Lampung II

Subauditorat Lampung II mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu, BUMD dan Instansi terkait di lingkungan entitas untuk:
  - 1) merumuskan rencana kegiatan;



- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  - 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Lampung.





## D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Sumber daya manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung per 31 Desember 2022 berjumlah 154 orang yang terdiri dari :

Kepala Perwakilan	:	1 orang
Kepala Sub Auditorat	:	2 orang
Kepala Sekretariat	:	1 orang
Kepala Sub Bagian	:	5 orang
Penempatan Pemeriksa	:	82 orang
Penempatan Penunjang	:	26 orang
Penempatan CPNS	:	37 orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>154 orang</b>

Adapun SDM BPK perwakilan Provinsi Lampung dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, usia, jabatan fungsional pemeriksa, jabatan fungsional lainnya, jabatan pelaksana, dan CPNS, serta jenis kelamin selama kurun waktu 4 tahun berturut-turut disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 1.1 Kelompok Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	2019	2020	2021	2022
1	S2	27	31	32	41
2	S1/D4	86	86	85	105
3	D3	3	4	5	8
4	SLTA/SMK	4	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>154</b>

Tabel. 1.2 Kelompok Pegawai Berdasarkan Usia

No.	Usia	2019	2020	2021	2022
1	≥ 51	1	1	3	6
2	41 – 50	17	22	27	26
3	31 – 40	68	67	66	68
4	26 – 30	19	22	22	35
5	≤ 25	12	6	4	19
	<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>154</b>

**Tabel. 1.3 Kelompok Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa**

No.	Fungsional Pemeriksa	2019	2020	2021	2022
1	Pemeriksa Utama	-	0	0	0
2	Pemeriksa Madya	-	5	3	3
3	Pemeriksa Muda	-	34	31	29
4	Pemeriksa Pertama	-	41	43	50
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>82</b>

\*Catatan terdapat perbedaan nomenklatur sejak tahun 2020 s.d. 2022

**Tabel. 1.4 Kelompok Pegawai Berdasarkan JF Lainnya dan Pelaksana**

No.	Fungsional Lainnya dan Pelaksana	2019	2020	2021	2022
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	-	-	1	1
2	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	-	-	1	1
3	Pranata Komputer Ahli Muda	-	-	1	1
4	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	-	-	3	3
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	-	-	-	-
6	Pranata Keuangan APBN Mahir	-	-	1	1
7	Pranata Komputer Terampil	-	-	1	1
8	Pelaksana	-	-	28	55
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>63</b>

\*Catatan jabatan pelaksana termasuk CPNS

**Tabel. 1.5 Kelompok Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
1	Laki-laki	65	68	65	82
2	Perempuan	55	53	57	72
	<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>154</b>





## E. ISU STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal dan Nasional untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal dan nasional, BPK diharapkan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana tema dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal dan nasional yang mendukung isu strategis tersebut.

Pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yaitu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) dan Pengelolaan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Pemeriksaan telah dilaksanakan sebanyak dua pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dilaksanakan pada dua entitas.

Pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yaitu dalam hal Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Kepada Masyarakat dan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLTDD). Pemeriksaan telah dilaksanakan sebanyak tiga pemeriksaan, yang terdiri dari dua pemeriksaan kinerja dan satu pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan dilaksanakan pada tiga entitas. Penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal dan nasional terdapat pada BAB 3, subbab capaian kinerja.



## BAB 2





# PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

## A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Lampung disusun dengan mengacu pada Renstra BPK 2020 – 2024 yang dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 – 2024. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024 berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Renstra BPK-Wide.

Renstra dirasakan penting dalam rangka menyuguhkan hasil kinerja BPK yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK.



## VISI

- *Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara*

## MISI

- *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan*
- *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara*
- *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya*

## TUJUAN STRATEGIS

- *Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat*

**Ilustrasi 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Strategis**

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan Sasaran Strategis yang sejalan dengan BPK-Wide yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan”.

Demi terwujudnya peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan, diperlukan penyempurnaan proses terkait kualitas perencanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta pemantauan kerugian negara.

Melalui SS1 ini, BPK Perwakilan Provinsi Lampung ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD), Pemerintah (instansi Pemerintah yang diperiksa



dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lain-lain.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyusun strategi yang dituangkan kedalam Peta Strategi. Sasaran strategis dan strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memvisualisasikan pola keterkaitan antar strategi tersebut ke dalam Peta Strategi berikut ini:



Gambar 2.1 Visualisasi Rencana Strategi BPK Perwakilan Provinsi Lampung

## B. PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

### I. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 dan untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian kinerja. IKU dan capaian kinerja dituangkan



dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada bulan Januari 2022.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target Tahun 2022
Meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pemeriksaan berkualitas</li> <li>Meningkatnya layanan pemeriksaan</li> </ul>	Rp22.429.973.000,00	IKU 1	Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%
	Rp8.912.393.000,00	IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%
	Rp13.517.580.000,00	IKU 3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%
		IKU 5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar	Sangat memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil evaluasi AKIP	A (87,00)
		IKU 9	Tingkat pemanfaatan manajemen pengetahuan	97%
		IKU 10	Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi	100%
			IKU 13	Tingkat kinerja anggaran

\*Sumber data: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Lampung) yang telah ditetapkan





## II. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan Nota Dinas Kalan Nomor 113/ND/XVIII.BLP/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 telah menyampaikan dokumen rencana aksi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana aksi dibuat untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja. Rencana aksi atas target dibuat per triwulan sesuai dengan permintaan laporan kinerja triwulan, terkecuali untuk target IKU 12 terkait pemenuhan jam diklat yang rencana aksinya dibuat per bulan.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, pada setiap indikator kinerja secara umum diantaranya:

- a. Melakukan rapat koordinasi terkait kegiatan pemeriksaan dan kegiatan non pemeriksaan (RKP dan RKSP);
- b. Melakukan identifikasi untuk percepatan persentase tindak lanjut pemeriksaan;
- c. Melakukan pemetaan profil pegawai terkait pemeriksaan dan diklat;
- d. Melakukan penandatanganan pakta integritas;
- e. Meningkatkan penggunaan aplikasi-aplikasi terbaik BPK seperti SIAP, SMP, SIPTL, SISDM, dan Jasmin;
- f. Mengidentifikasi praktik terbaik dalam usulan inovasi manajemen pengetahuan.

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi secara detail disajikan pada **Lampiran 1 dan 2**.



## BAB 3



# AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

## A. HASIL EVALUASI AKIP

Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, berdasarkan Nota Dinas Itama Nomor 227/ND/XI/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal penyampaian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021, diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendapatkan nilai sebesar 90,14 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

Pada hasil evaluasi Itama atas implementasi SAKIP Tahun 2021 terdapat beberapa hal yang akan menjadi perhatian, diantaranya:

1. Pada bagian pelaporan kinerja, diketahui:
  - a. Laporan Kinerja (Lakin) belum menyajikan secara menyeluruh evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja mengenai faktor penyebab tercapainya/tidak tercapainya target kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kerjanya;
  - b. Lakin hanya menyajikan informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan dalam penggunaan sumber daya, namun besaran efisiensi yang terjadi belum dikuantifikasikan;
  - c. Lakin telah menyajikan informasi keuangan (anggaran dan realisasi) namun tidak dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu.
2. Pada bagian Capaian kinerja, diketahui masih terdapat IKU yang dibawah target yaitu IKU 1 (Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan) dan IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK).



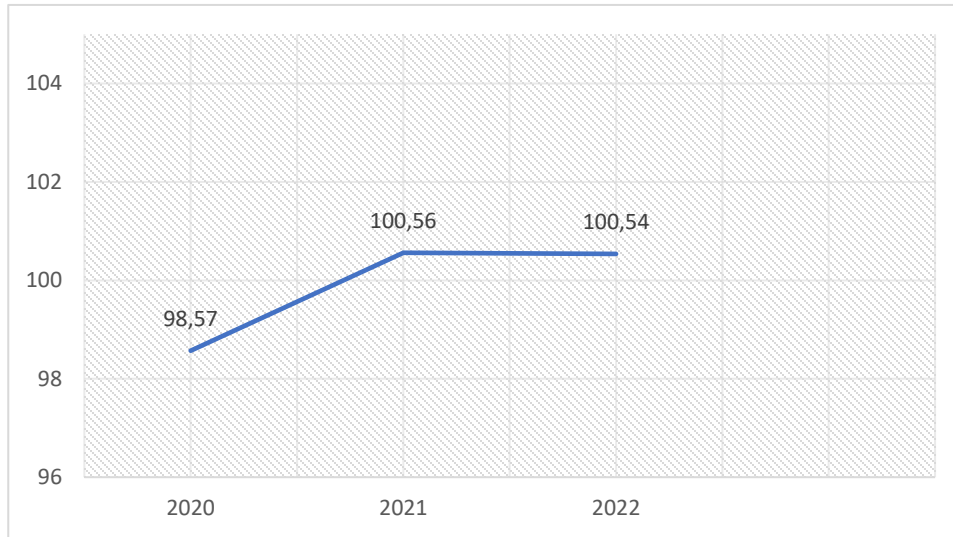
Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan melakukan beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja yang dihasilkan, sebagai berikut:

1. Upaya perbaikan pada bagian pelaporan kinerja, yaitu:
  - a. Untuk menyajikan secara menyeluruh evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja baik mengenai faktor penyebab tercapainya/tidak tercapainya target kinerja dan solusi yang akan dilakukan;
  - b. Untuk berusaha menyediakan data kuantitatif nilai efisiensi yang dihasilkan pada setiap indikator kinerja;
  - c. Untuk menyajikan informasi keuangan (anggaran dan realisasi) pada setiap indikator kinerja.
2. Upaya perbaikan pada capaian kinerja IKU 1 dengan meningkatkan *quality control dan quality assurance* pada setiap pemeriksaan dan meningkatkan tata cara kerja tim reviu serta peningkatan kinerja tim *checker* untuk kualitas LHP .
3. Upaya perbaikan pada capaian kinerja IKU 7 dengan meningkatkan nilai-nilai dasar pada setiap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Perwakilan Provinsi Lampung memiliki sarana program WA grup yang setiap hari menyampaikan dan mengingatkan nilai-nilai dasar BPK dengan sapaan “Tabik Pun”.

## **B. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang mendukung pengukuran capaian kinerja BPK. Pada Tahun 2022, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebesar 100,54. Skor tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 100,56. Skor capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.





**Gambar 3.1 Tren Kinerja Selama 3 Tahun**

Pada gambar 3.1 diketahui skor kinerja tahunan selama Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung masih mampu mempertahankan status hijau atau diatas nilai 100 sebanyak dua kali. Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2022 mampu meningkat jauh dibanding awal renstra tahun 2020 yang hanya sebesar 98,57. Namun perlu diakui bahwa dibandingkan pada tahun 2021, skor kinerja mengalami penurunan dari sebesar 100,56 menjadi 100,54.

Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2022 telah sesuai dengan arah dari Renstra BPK 2020-2024.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022

Uraian Indikator Kinerja Utama		Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
IKU 1	Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100,00%	89,41%	89,41
IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100,00%	100,00%	100,00
IKU 3	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	75,00%	82,36%	105,00
IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik nasional	100,00%	100,00%	100,82
IKU 5	Tingkat pemenuhan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	100,00%	100,05%	100,05
IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik lokal	100,00%	100,59%	100,59
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,72	94,40
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	88,00 (A)	90,14 (AA)	102,43
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	97,66%	100,68
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	120,00%	105,00
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,30	105,00
IKU 12	Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,00%	90,11%	102,40
<b>Skor Kinerja 2022</b>				<b>100,54</b>



Adapun perbandingan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung realisasi tahun 2022 dengan realisasi selama tiga tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Selama Tiga Tahun Terakhir**

Uraian Indikator Kinerja Utama		2022		2021		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>Skor Tahunan</b>			<b>100,54</b>		<b>100,56</b>		<b>98,57</b>
IKU 1	Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100,00%	89,41%	100,00%	90,00%	100,00%	95,59%
IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
IKU 3	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	75,00%	82,36%	75,00%	80,41%	75,00%	81,58%
IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik nasional	100,00%	100,82%	100,00%	100,30%	100,00%	100,72%
IKU 5	Tingkat pemenuhan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	100,00%	100,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik lokal	100,00%	100,59%	100,00%	100,45%	100,00%	100,00%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,72	5,00	4,48	5,00	4,60
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	88,00 (A)	90,14 (AA)	87,00 (A)	91,42 (AA)	86,00 (A)	87,81 (A)
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	97,66%	96,00%	98,81%	96,00%	99,64%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	120,00%	100,00%	112,50%	100,00%	50,00%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,30	3,80	3,99	3,80	3,90
IKU 12	Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%



Uraian Indikator Kinerja Utama			2022		2021		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,00%	90,11%	87,50%	91,02%	87,00%	92,48%	

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahunan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun**

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	100%	100%	100%	100%	100%	89,41%	89,41
IKU 2	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00
IKU 3	75%	75%	75%	75%	75%	82,36%	105,00
IKU 4	100%	100%	100%	100%	100%	100,82%	100,00
IKU 5	100%	100%	100%	100%	100%	100,05%	100,05
IKU 6	100%	100%	100%	100%	100%	100,59%	100,59
IKU 7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,72	94,40
IKU 8	88,00 (A)	87,00 (A)	88,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)	90,14 (AA)	102,43
IKU 9	96%	96%	97%	97%	97%	97,66%	100,68
IKU 10	100%	100%	100%	100%	100%	120,00%	105,00





Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 11	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,30	105,00
IKU 12	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00
IKU 13	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,00%	90,11%	102,40

Target dan Pengukuran IKU tersebut disesuaikan dengan Renstra BPK RI tahun 2020-2024 . Secara umum, diketahui hasil realisasi capaian IKU Tahun 2022, terdapat empat IKU sesuai target, enam IKU melampaui target, dan tiga IKU terealisasi di bawah target. Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang selalu berusaha untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut.

#### IKU 1. Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator atas IKU 1 ini adalah dalam rangka mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* serta eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Adapun tujuan dari IKU ini yaitu mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan. Capaian tersebut diukur berdasarkan dokumen pendukung berupa QA dan QC yang telah diperoleh dan telah ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Kepala Sub Auditorat serta Kepala Perwakilan, hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan hasil reviu Itama. Berikut perkembangan capaian IKU 1 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.4. Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	95,59%	90,00%	89,41%		
Capaian	95,59	90,00	89,41		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	95,59%	90,00%	89,41%		

Realisasi IKU 1 tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan tahun 2022 adalah sebesar 89,41% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU 1 masih lebih rendah dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 90,00.

Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh belum optimalnya tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung dari hasil evaluasi EPP. LHP yang diterbitkan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebanyak 27 LHP yang terdiri dari 17 output pada semester 1 dan sebanyak 10 output pada semester 2. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat EPP Nomor 363/ND/XII.2/07/2022 tanggal 5 September 2022 diketahui beberapa kelemahan tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan pada semester 1 oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Upaya untuk mendorong capaian IKU 1 agar sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu:

- Meningkatkan pengujian kualitas berupa konsistensi kalimat dan akurasi angka KHP oleh masing-masing tim pemeriksa;
- Meningkatkan pengujian konsistensi kalimat oleh Tim *Checker* Perwakilan.



Realisasi IKU 1 telah mencapai 89,41% dari target 100%. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat mencapai target IKU 1 sebesar 100% seluruhnya hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga diharapkan dapat menerapkan *zero defect* atas hasil pemeriksaan.

Penyerapan anggaran terkait IKU 1 terhubung pada pelaksanaan pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung hingga menjadi output sebanyak 27 LHP yakni terealisasi sebesar Rp5.462.175.314,00 atau 99,31% dari pagu anggaran.

### IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator atas IKU 2 untuk menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Adapun tujuan dari IKU ini adalah untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP. Berikut perkembangan capaian IKU 2 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.5. Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024**

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%		
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,00%	100,00%	100,00%		

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU 2 telah sesuai target yang ditetapkan. Realisasi IKU 2 juga tidak mengalami penurunan/kenaikan selama 3 tahun terakhir.



Ketercapaian realisasi IKU 2 didukung dengan meningkatkan, pengecekan, pengawasan, dan perbaikan pada P2 baik dari tahap Ketua Tim Pemeriksa hingga Kepala Perwakilan sebelum pemeriksaan dilaksanakan agar kesesuaian harapan penugasan, tujuan pemeriksaan dan simpulan dapat sejalan dan selaras dengan Visi dan Misi BPK.

Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 2 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Rapat koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2022 dengan memperhatikan Renstra BPK dan kebijakan AKN V;
- b. Pemberi Tugas Pemeriksaan menyatakan secara tertulis dan jelas Harapan Penugasan pemeriksaan yang dituangkan pada P2;
- c. Pengendali Teknis meningkatkan reviu kesesuaian Program Pemeriksaan dengan Harapan Penugasan.

Realisasi IKU 2 telah mencapai sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus mempertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berusaha agar hasil pemeriksaan Perwakilan Provinsi Lampung dinilai telah sesuai dengan harapan penugasan berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat EPP.

Penyerapan anggaran terkait IKU 2 tidak terlepas dari anggaran pelaksanaan pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung hingga menjadi output sebanyak 27 LHP yakni terealisasi sebesar Rp5.462.175.314,00 atau 99,31% dari pagu anggaran.

### IKU 3 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.





Tujuan IKU 3 ini guna mendorong pelaksana BPK dalam merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu hingga per 31 Desember 2022 sesuai *database* EPP pada Aplikasi SMP. Berikut perkembangan capaian IKU 3 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.6. Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024**

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	81,58%	80,41%	82,36%		
Capaian	81,58	80,41	82,36		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	108,77%	107,21%	109,81%		

Realisasi IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebesar 82,36% dari target sebesar 75%, sehingga capaian IKU 3 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi IKU 3 juga mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir.



Tabel 3.7 Jumlah Rekomendasi BPK per 31 Desember 2022

No.	Status	Jumlah	Presentase
1	Sesuai dengan Rekomendasi	11.653	82,32%
2	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	2.219	15,68%
3	Belum Ditindaklanjuti	278	1,96%
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	6	0,04%
	<b>Jumlah Rekomendasi</b>	<b>14.156</b>	

\*Sumber data: TLRHP Evaluasi EPP (IHPS semester 1 tahun 2022)

Ketercapaian realisasi IKU 3 didukung dengan meningkatkan pemantauan pelaksanaan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas melalui aplikasi SIPTL dan mendorong pemerintah daerah dengan meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten.

Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 3 agar melampaui target yang telah ditetapkan yaitu:

- Mengidentifikasi kesulitan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya;
- Inventarisasi rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK yang belum ditindaklanjuti dan melakukan analisis;
- Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat dan Satuan Pengawas Internal BUMD.

Realisasi IKU 3 telah mencapai sebesar 82,36% dari target sebesar 75,00%. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus mempertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berusaha agar persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Perwakilan Provinsi Lampung diatas target yang ditetapkan.

Penyerapan anggaran terkait IKU 3 tidak terlepas dari anggaran komponen melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga menjadi output sebanyak 32 laporan pemantauan yakni terealisasi sebesar Rp185.691.600,00 atau 96,42% dari pagu anggaran.



#### IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Lampung, selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional. Hal ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah output, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

IKU ini merupakan indikator baru yang mulai berlaku pada tahun 2020 (sesuai Renstra BPK 2020-2024). IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Lampung berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional dengan menurunkan tiga tim pemeriksaan, yaitu: dua tim untuk pemeriksaan kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Kepada Masyarakat dan satu tim pemeriksaan kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLTDD). Berikut perkembangan capaian IKU 4 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.8. Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020-2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	100,72%	100,30%	100,82%		
Capaian	100,72	100,30	100,82		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,72%	100,30%	100,82%		

Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar 100,82% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 4 telah sesuai target yang ditetapkan. Realisasi IKU 4 tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 100,82% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 100,30%. Hal tersebut sudah termasuk penambahan skor atas pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional sebesar 0,82.

Ketercapaian realisasi IKU 4 didukung dengan mengikuti rapat koordinasi pemeriksaan tematik nasional dan memastikan ketersediaan anggaran dan personil di perwakilan serta menyusun tim pemeriksaan tematik nasional.

Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 4 atas target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Mengikuti rapat koordinasi perkembangan pemeriksaan tematik nasional;
- b. Mengikuti rapat koordinasi evaluasi pemeriksaan tematik nasional.

Realisasi IKU 4 telah mencapai sebesar 100,82% dari target sebesar 100,00%. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus mempertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berusaha agar terus mampu untuk melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dalam menghadapi isu-isu strategis.



Penyerapan anggaran terkait IKU 4 terhubung pada pelaksanaan pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung hingga menjadi output sebanyak 27 LHP yakni terealisasi sebesar Rp5.462.175.314,00 atau 99,31% dari pagu anggaran. Khusus LHP tematik lokal direalisasikan sebanyak tiga output dari total 27 output.

#### IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator atas IKU 5 untuk menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini juga menunjukkan tingkat reponsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2022 pernah menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Berikut perkembangan capaian IKU 5 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.9. Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024**

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan Dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,05%		
Capaian	100,00	100,00	100,05		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,00%	100,00%	100,05%		

Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan sebesar 100,05% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 5 telah melampaui





target yang ditetapkan. Realisasi IKU 5 merupakan IKU bonus (walaupun sampai dengan akhir tahun tidak ada permintaan dari para pemangku kepentingan untuk melakukan pemeriksaan, maka secara umum realisasi tetap diperhitungkan sebesar 100%) dan tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2021. Kenaikan IKU 5 diakibatkan adanya penambahan skor sebesar 0,05 atas pelaksanaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Lampung memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Riau Periang, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah TA 2017 di Jakarta, Bandar Lampung, dan Lampung Tengah. Pemeriksaan tersebut dibuktikan dengan dokumen Surat Tugas Nomor 301/ST/XXI/07/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan 411/ST/XXI/08/2022 25 Agustus 2022 serta LHP nomor 27/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022.

Ketercapaian realisasi IKU 5 didukung dengan melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 5 atas target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Tetap melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan;
- b. Terus berupaya mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Realisasi IKU 5 sebesar 100,05% telah melebihi target tahun 2022 sebesar 100,00%. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus mempertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berusaha agar terus berkontribusi dalam permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Penyerapan anggaran terkait IKU 5 pada tahun 2022 tidak ada secara langsung pada anggaran pelaksanaan pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung sehingga tidak terdapat penyerapan anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.



## IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator atas IKU 6 untuk menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's. Pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah tertuang dalam RPJMD.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Penetapan atas hal-hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun 2022.

Pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan oleh Perwakilan Lampung yaitu: satu tim Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) dan satu tim Pengelolaan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Pemeriksaan telah dilaksanakan sebanyak dua pemeriksaan kinerja dan dilaksanakan pada dua entitas. Berikut perkembangan capaian IKU 6 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.10. Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024**

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	100,00%	100,45%	100,59%		
Capaian	100,00	100,45	100,59		



IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,00%	100,45%	100,59%		

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sebesar 100,59% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 6 telah sesuai target yang ditetapkan. Terdapat alokasi penambahan skor atas realisasi LHP tematik lokal sebesar 0,59.

Ketercapaian realisasi IKU 6 didukung dengan mengikuti rapat koordinasi pemeriksaan tematik lokal dan memastikan ketersediaan anggaran di perwakilan serta menyusun tim pemeriksaan tematik lokal.

Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 6 atas target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Mengikuti rapat koordinasi perkembangan pemeriksaan tematik lokal;
- b. Mengikuti rapat koordinasi evaluasi pemeriksaan tematik lokal.

Realisasi IKU 6 telah mencapai sebesar 100,59% dari target sebesar 100,00%. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus mempertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berusaha agar terus mampu untuk melaksanakan pemeriksaan tematik lokal dalam menghadapi isu-isu strategis.

Penyerapan anggaran terkait IKU 6 terhubung pada pelaksanaan pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung hingga menjadi output sebanyak 27 LHP yakni terealisasi sebesar Rp5.462.175.314,00 atau 99,31% dari pagu anggaran. Khusus LHP tematik lokal direalisasikan sebanyak dua output dari total 27 output.



### IKU 7 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Pengembangan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan dalam mewujudkan manfaat yang diinginkan, dimana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi.

IKU 7 bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana nilai dasar BPK telah diimplementasikan oleh para pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku pegawai. Pengukuran IKU ini mulai diukur pada saat pegawai sudah mulai paham dengan nilai dasar BPK dan kemudian menerapkan nilai tersebut. Berikut perkembangan capaian IKU 7 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.11. Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024**

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,60	4,48	4,72		
Capaian	92,00	89,60	94,40		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	92,00%	89,60%	94,40%		

Realisasi IKU 7 Tingkat Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK tahun 2022 adalah sebesar 4,72 dari target sebesar 5,00, sehingga capaian IKU 7 masih lebih rendah dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir.



Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi dan supervisi secara vertikal dan horisontal dengan program-program BPK Perwakilan Provinsi Lampung ke seluruh pegawai.

Upaya untuk mendorong capaian IKU 7 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan nilai-nilai dasar pada setiap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Peningkatan dilakukan dengan cara supervisi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK, budaya kerja, dan kode etik serta gratifikasi. Salah satu program BPK Perwakilan Provinsi Lampung yaitu sarana WA grup yang setiap hari menyampaikan dan mengingatkan nilai-nilai dasar BPK dengan sapaan “Tabik Pun” serta program *honest for your honor*.

Realisasi IKU 7 telah mencapai sebesar 4,72 dari target sebesar 5,00. Dengan menerapkan langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat mencapai target IKU 7 sebesar 5,00 seluruhnya hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga diharapkan dapat terus mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK ke seluruh pegawai.

Penyerapan anggaran terkait IKU 7 tidak ada secara langsung ke anggaran perwakilan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan menggunakan media sosial WA dan rapat internal per subbag dan subauditorat serta sosialisasi daring ke pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

#### IKU 8 – Hasil Evaluasi AKIP

IKU 8 ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi BPK sebagai lembaga publik. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, Perwakilan Provinsi Lampung wajib untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Lampung, Laporan ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik. Berikut perkembangan capaian IKU 8 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.





Tabel 3.12. Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
Realisasi	87,81	91,42	90,14		
Capaian	102,10	105,00	102,44		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	98,66%	102,72%	101,28%		

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 227/ND/XI/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal penyampaian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021, diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendapatkan nilai sebesar 90,14 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 telah mencapai sebesar 90,14 (AA) dari target sebesar 88,00 (A), sehingga capaian IKU 8 melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 91,42 (AA).

Ketercapaian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Sasaran yang dimuat dalam Renstra telah dipetakan/diidentifikasi pada setiap kegiatan dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA;
- Pengukuran kinerja samapai dengan level Eselon II telah dilakukan secara berkala dengan suatu mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan aplikasi PRISMA;
- Hasil pengukuran capaian kinerja telah digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian *reward* dan *punishment*;



- d. Lakin Perwakilan telah menyajikan seluruh pencapaian kinerja dan informasi kinerja yang diperjanjikan dalam PK;
- e. Lakin Perwakilan telah menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target tahun berjalan dan antara realisasi dan capaian tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya;
- f. Informasi kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- g. Dokumentasi proses dan hasil evaluasi berupa kesimpulan atas keberhasilan/kegagalan kegiatan dan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan serta langkah nyata yang dilakukan atas rekomendasi yang diberikan telah dituangkan dalam penyajian Lakin secara triwulanan.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU 8 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Untuk menyajikan secara menyeluruh evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja baik mengenai faktor penyebab tercapainya/tidak tercapainya target kinerja dan solusi yang akan dilakukan;
- b. Untuk berusaha menyediakan data kuantitatif nilai efisiensi yang dihasilkan pada setiap indikator kinerja;
- c. Untuk menyajikan informasi keuangan (anggaran dan realisasi) pada setiap indikator kinerja;
- d. Untuk mengoptimalkan capaian kinerja yang dibawah target.

Realisasi IKU 8 telah melebihi target sebesar 88,00. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat mempertahankan mencapai target IKU 8 hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyerapan anggaran atas IKU 8 secara khusus tidak ada, dikarenakan pemerolehan angka pada SAKIP merupakan hasil dari kinerja dari keseluruhan kegiatan perwakilan yakni terealisasi sebesar Rp24.937.746.993,00 atau 99,04% dari total anggaran. Namun jika dikhususkan, terdapat anggaran untuk kegiatan komponen melaksanakan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko yang direalisasikan sebesar Rp29.023.020,00 atau 99,83%.



## IKU 9 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, *database* dan jaringan yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat mendorong *IT culture* di BPK, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijadikan sebagai indikator dalam mengukur capaian IKU 9 antara lain SISDM, SIPTL, SMP, Jasmin, dan SIAP. Berikut perkembangan capaian IKU 9 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.13. Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024**

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	96,00%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Realisasi	99,64%	98,81%	97,66%		
Capaian	104,89	102,93	100,68		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	102,72%	101,87%	100,68%		

Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tahun 2022 adalah sebesar 97,66%. Capaian realisasi tersebut melampaui dari target sebesar 97,00%. Walaupun begitu, realisasi IKU ini pada tahun 2022 mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir yakni sebesar 98,81 tahun 2021 dan 99,64% tahun 2020.



Ketercapaian tersebut disebabkan oleh optimalnya penggunaan aplikasi SMP, SIAP, SIPTL, Jasmin, dan SISDM. Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan persuratan sudah melalui aplikasi Jasmin;
- b. Proses *update* pegawai dilaksanakan semua menggunakan aplikasi SISDM;
- c. Upload dokumen LHP terlaksana semua di aplikasi SMP;
- d. Penggunaan secara optimal *update* TLRHP melalui aplikasi SIPTL;
- e. Penggunaan aplikasi SIAP dalam pemeriksaan selama tahun 2022.

Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 9 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu seluruh pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan layanan Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian, dipertahankan pemetaan perencanaan hingga pelaporan pemeriksaan serta proses upload di SMP terutama untuk pemeriksaan semester 2 agar dapat terselesaikan ketika dilakukan tarik data oleh Biro TI.

Realisasi IKU 9 telah mencapai sebesar 97,66% dari target sebesar 97,00%. Dengan menerapkan langkah diatas, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat mencapai target IKU 9 sebesar 97,00% seluruhnya hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus meningkatkan pemanfaatan layanan Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerapan anggaran terkait IKU 9 tidak ada pada mata anggaran perwakilan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara aplikasi di internet (domain bpk.go.id) dan untuk biaya internet juga telah dipusatkan ke Biro TI BPK RI.

#### IKU 10 – Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan. Manajemen pengetahuan (*knowledge*



*management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi. Berikut perkembangan capaian IKU 10 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.14. Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024**

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	50,00%	112,50%	120,00%		
Capaian	50,00	105,00	105,00		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	50,00%	112,50%	120,00%		

Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan tahun 2022 adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 10 telah melampaui target





yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sebesar 112,50% dan tahun 2020 sebesar 50,00%.

Ketercapaian tersebut disebabkan oleh optimalnya proses *pen-delivery-an* peran manajemen pengetahuan pada perwakilan. Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mampu melaksanakan 4 dari 9 aktivitas manajemen pengetahuan. Selain itu, juga mampu menyusun program *best practice* yang disetujui oleh Tim Kurasi *Best Practice*.

Aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Lampung, adalah kegiatan Reviu Pasca Aktivitas terkait program E-LHKASN, kegiatan mentoring yang terdiri dari sebanyak mentoring CPNS 39 orang dan mentoring pemeriksaan 1 orang, kegiatan *peer assist* dan Diklat persiapan pemeriksaan atas LKPD. Kemudian, berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 757/ND/XII.1/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal penyampaian hasil penilaian atas usulan dan replikasi *best practice* dan Nomor 53/ND/XII.1/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal penyampaian hasil penilaian atas usulan dan replikasi *best practice*. Usulan *best practice* BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah diakui sebagai capaian indikator kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2022 pada satuan kerja. *Best Practice* BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah diakui Tim Kurasi *Best Practice* adalah WA *Hotline* dan e-LHKASN. Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 10 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Melaksanakan diklat persiapan pemeriksaan atas LKPD pada tahun 2023;
- b. Melaksanakan reviu pasca aktivitas atas WA *Hotline* sebagai salah satu *best practice* BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. Melakukan *coaching* atasan ke bawahan yang telah menyelesaikan kegiatan API atas *assesment-nya*;
- d. Melaksanakan kegiatan *peer assist*;
- e. Melaksanakan kegiatan mentoring pemeriksaan;
- f. Melaksanakan kegiatan KTF internal perwakilan; dan
- g. Sedangkan untuk *best practice*, melakukan replikasi atas kegiatan program seperti *TP Goes to MTP*.



Realisasi IKU 10 telah melebihi target sebesar 100,00%. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang memberikan nilai tambah untuk perwakilan dan BPK RI.

Penyerapan anggaran terkait IKU 10 tidak ada secara khusus pada mata anggaran perwakilan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut seperti diklat dilakukan daring dan pelaksana adalah badan diklat. Kegiatan mentoring dan reviu pasca aktivitas juga tidak ada pembebanan anggaran khusus. Namun Subbag SDM tetap dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi pada komponen layanan manajemen internal perwakilan yang terealisasi Rp156.013.366,00 atau 94,24%.

IKU 11 – Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan (sebagai subbag pengampu). Indikator ini bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan Provinsi Lampung agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Berikut perkembangan capaian IKU 11 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.15. Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024**

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan Atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,90	3,99	4,30		



IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan Atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	102,63	105,00	105,00		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	102,63%	105,00%	113,16%		

Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan Atas Kualitas Komunikasi tahun 2022 adalah sebesar 4,30 dari target sebesar 3,80, sehingga capaian IKU 11 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sebesar 3,99 dan tahun 2020 sebesar 3,90.

Ketercapaian tersebut disebabkan oleh optimalnya komunikasi yang terjalin antara BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan *stakeholders* baik masyarakat, IPH, LSM (wartawan) dan pemerintah daerah serta lembaga lainnya baik secara kunjungan, program pemeriksaan, dan program non pemeriksaan (layanan WA *Hotline* dan *TP Goes to MTP*). Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 11 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu:

- Menjalinkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan *stakeholders*;
- Mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan dan non pemeriksaan dengan pihak luar dan menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas.
- Mengoptimalkan layanan WA *Hotline* sebagai sarana komunikasi yang lebih baik, cepat, murah dan termonitor oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung kepada *stakeholders*;
- Mengoptimalkan program seperti *TP Goes to MTP* dalam berkoordinasi dengan IPH.

Realisasi IKU 11 telah melebihi target sebesar 3,80. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan Tingkat Kepuasan Para



Pemangku Kepentingan Atas Kualitas Komunikasi yang memberikan nilai tambah untuk kepercayaan pihak *stakeholders*.

Penyerapan anggaran atas IKU 11 secara khusus tidak ada, dikarenakan pemerolehan angka pada tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi merupakan hasil survei *online* yang dilaksanakan kepada pihak eksternal. Adapun anggaran untuk mendukung kegiatan kualitas komunikasi kehumasan yaitu layanan perkantoran pada layanan kehumasan terealisasi sebesar Rp38.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

IKU 12 – Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diberbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti juga pegawai pemeriksa, pegawai non-pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yang diemban. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan per tahunnya adalah 40 jam. Adapun IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. Sedangkan pengembangan kompetensi bagi pegawai non pemeriksa setiap tahunnya wajib terpenuhi sebanyak 20 jam. Berikut perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.16. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024**

IKU 12 Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



IKU 12 Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	95,00%	100,00%	100,00%		
Capaian	102,63	105,00	105,00		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	95,00%	100,00%	100,00%		

Realisasi IKU 12 Pemenuhan Pengembangan Kompetensi tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian IKU 12 telah sesuai target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 sebesar 100,00%. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh optimalnya pemetaan dan analisis diklat pegawai yang telah dilaksanakannya oleh Subbag SDM. Subbag SDM melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi telah mencakup seluruh pegawai yang meliputi pemeriksa dan nonpemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, dan dilaksanakan secara berkesinambungan serta dimonitoring secara berkala (perbulan). Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 12 agar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu:

- Membuat pemetaan dan analisis serta membuat usulan dan pelaksanaan diklat (juga KTF) untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
- Melaksanakan monitoring diklat untuk pegawai secara berkala.

Realisasi IKU 12 telah sesuai target sebesar 100,00%. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus melakukan monitoring diklat kepada seluruh pegawainya.

Penyerapan anggaran atas IKU 12 secara khusus tidak ada, dikarenakan program diklat merupakan lingkup balai diklat. Adapun anggaran untuk mendukung kegiatan





pengembangan kompetensi pada komponen layanan manajemen internal perwakilan yang terealisasi Rp156.013.366,00 atau 94,24%.

### IKU 13 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran merupakan indikator kinerja dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan. IKU 13 ini dibuat untuk mengukur kinerja satker dalam penggunaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 dinilai dari empat indikator yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, capaian keluaran, dan efisiensi. Berikut perkembangan capaian IKU 13 Tahun 2022 selama renstra 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.17. Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024**

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,00%
Realisasi	92,48%	91,02%	90,11%		
Capaian	105,00	104,02	102,40		
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	103,91%	102,27%	101,25%		

Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tahun 2022 adalah sebesar 90,11% dari target sebesar 88,00%, sehingga capaian IKU 13 telah sesuai target yang



ditetapkan. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 91,02%.

Ketercapaian tersebut disebabkan oleh optimalnya rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran dan arah kebijakan tahun lalu dan tahun berjalan, menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran, dan melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) dan pemantauan penarikan DIPA.

Upaya untuk mempertahankan capaian IKU 13 agar sesuai target yang telah ditetapkan dengan menyusun data capaian output dan melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung. Realisasi IKU 13 telah melampaui target sebesar 90,11%. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat dipertahankan dan meningkatkan hingga target tahun 2024. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus melakukan monitoring realisasi anggarannya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Penyerapan anggaran atas IKU 13 merupakan keseluruhan anggaran yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Lampung yaitu realisasi sebesar Rp24.937.746.993,00 atau 99,04%.

### C. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menetapkan SABURAI sebagai budaya organisasi yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung. BPK Perwakilan provinsi Lampung memilih SABURAI sebagai budaya yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. SABURAI, yang memiliki kepanjangan arti yaitu Sinergi, Akuntabel, Bebas, Unggul, Responsif, Andal dan Inovatif. Kegiatan implementasi atas budaya kerja SABURAI, yaitu:



Tabel 3.18. Implementasi Budaya Kerja SABURAI terkait dengan Indikator Kinerja

Budaya Kerja	Uraian	Indikator Kinerja yang Terpengaruh
Sinergi dan Akuntabel	Kerjasama dan saling dukung dalam meningkatkan nilai-nilai dasar pegawai. Program-program yang mendukung hal tersebut adalah: a. <i>Honest for your honor</i> ; b. Adanya IK Penyusunan Tim dan pengambilan sampel; c. Adanya <i>e-form</i> dan <i>helpdesk</i> pelaporan gratifikasi; d. Adanya MoU Hotel terkait perjalanan dinas; e. Adanya program Tabik Pun dalam men- <i>share</i> kode etik dan nilai-nilai dasar.	- IKU 1 - IKU 7 - IKU 11
Bebas dan Andal	Untuk menjamin hasil pemeriksaan yang bebas dari intervensi pihak manapun, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyusun IK Penyusunan Tim Pemeriksaan dan IK Pemilihan Sampel, sehingga pemilihan tim pemeriksa dan pemilihan sampel benar-benar didasari pertimbangan professional sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.	- IKU 1 - IKU 2 - IKU 4 - IKU 6 - IKU 13
Responsif	Dengan adanya WA <i>Hotline</i> Perwakilan Provinsi Lampung dengan nomor 0813-6969-4488 yang memuat empat menu utama (permintaan informasi, pengaduan, koordinasi TP Goes to MTP, koordinasi Berjaya-APH) diharapkan komunikasi dengan masyarakat, entitas, dan aparat penegak hukum dapat berjalan efisien dan efektif.	- IKU 7 - IKU 11
Unggul dan Inovatif	Terdapat beberapa program inovasi seperti: a. WA <i>Hotline</i> ; b. TP Goes MTP; c. Berjaya-APH; d. E-LHKASN.	- IKU 7 - IKU 11

#### D. ANALISIS EFISIENSI

BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2022, telah melakukan berbagai upaya efisiensi dalam pencapaian kinerja agar mendapatkan hasil yang optimal. Berikut kami sampaikan beberapa upaya efisiensi pada capaian kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yaitu:

1. Tingkat efisiensi pada IKU 1, berupa:
  - a. Efisiensi atas penyesuaian atas pagu anggaran pada pemeriksaan pada semester 2 dan penyesuaian jumlah pegawai yang mendukung pemeriksaan tersebut;



- b. Efisiensi dan optimalisasi atas penggunaan aplikasi SiAP dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga monitoring pemeriksaan bisa diketahui secara *real time, up to date* serta *paperless*. Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.
2. Tingkat efisiensi pada IKU 2, berupa:
    - a. BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan pengawasan awal terkait monitoring pada kesesuaian pada P2 terkait harapan penugasan dengan proses dan hasil pemeriksaan yang akan bermanfaat pada saat penentuan besaran sampling pemeriksaan. BPK memiliki Instruksi Kerja dalam penyusunan tim pemeriksaan dan pengambilan sampel, yaitu IK Nomor 49/K/XVIII.BLP/10/2022 dan Nomor 44/K/XVIII.BLP/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Hal ini, juga akan membantu dalam saat tim reviu atas rapat penentuan opini;
    - b. Adanya monitoring dan evaluasi atas kesesuaian pada P2 terkait harapan penugasan dengan proses dan hasil pemeriksaan yang akan bermanfaat pada saat penentuan besaran sampling pemeriksaan tahun sebelumnya pada pembuatan P2 berikutnya.
  3. Tingkat efisiensi pada IKU 3 berupa:
    - a. Melakukan monitoring dan tim perepatan penyelesaian TLRHP Tahun 2022 setiap bulan. BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada semester II 2022 menyelenggarakan kegiatan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan setiap bulan. Upaya tersebut berhasil mendorong *auditee* untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
    - b. Memberikan dorongan pencapaian target penyelesaian TLRHP pada *entry meeting* pemeriksaan LKPD setiap semester I;



- c. Efisiensi atas jumlah hari dan jumlah personil yang ditugaskan dalam pemantauan dari masing-masing Subauditorat;
  - d. Efisiensi atas penggunaan SIPTL dalam pemantauan TLRHP sehingga pemantauan bisa dilakukan secara *realtime*, *uptodate*, dan *paperless*. Perubahan metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*;
  - e. Manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas dan belanja barang, serta fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.
4. Tingkat efisiensi pada IKU 4 adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan penyesuaian jumlah pemeriksa dan jumlah anggaran yang disediakan untuk mengakomodir kegiatan pemeriksaan tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyiapkan secara matang perencanaan dalam penyusunan tim untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai P2 dan harapan penugasan, dan sampel pemeriksaan serta disesuaikan dengan kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan oleh pemeriksa sebagai fungsional.
  5. Tingkat efisiensi pada IKU 5 adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan penyesuaian jumlah pemeriksa dan jumlah anggaran yang disediakan untuk mengakomodir tujuh kegiatan pemeriksaan tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyiapkan secara matang perencanaan dalam penyusunan tim untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai P2 dan harapan penugasan, dan sampel pemeriksaan serta disesuaikan dengan kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan oleh pemeriksa sebagai fungsional.



6. Tingkat efisiensi pada IKU 6 adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah melakukan penyesuaian jumlah pemeriksa dan jumlah anggaran yang disediakan untuk mengakomodir kegiatan pemeriksaan tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyiapkan secara matang perencanaan dalam penyusunan tim untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai P2 dan harapan penugasan, dan sampel pemeriksaan serta disesuaikan dengan kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan oleh pemeriksa sebagai fungsional.
7. Tingkat efisiensi pada IKU 7 adalah adanya perubahan pelaksanaan dengan metode survei *online* antara internal BPK dan pihak surveyor. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain diharapkan penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak surveyor berupa efisiensi tenaga surveyor, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*. Survei online tersebut disebarkan kepada pegawai. Penyerapan anggaran atas kegiatan ini hampir tidak ada dikarenakan survei *online* yang telah dilaksanakan.
8. Tingkat efisiensi pada IKU 8 adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung meningkatkan indikator-indikator yang tidak tercapai tahun lalu dan mempertahankan indikator kinerja yang telah tercapai. Transparansi pekerjaan telah dilaksanakan dalam mendukung renta BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan output yang telah dirancang/direncanakan pada KAK Perwakilan baik dalam RKP dan RKSP direalisasikan 100% sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan ke PSMK dan Tortama. Proses kegiatan IKU 8 telah dilakukan secara efisien dikarenakan pelaksanaan seperti FGD dilakukan secara daring dan menggunakan aplikasi Prisma-Sakip yang mempermudah perwakilan dalam melakukan koordinasi.
9. Tingkat efisiensi pada IKU 9 adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melaksanakan sebagian besar tugas dan fungsi dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah dalam hal pengerjaan dan koordinasi. Beberapa efisiensi tersebut terlihat pada sebagai berikut:
  - a. Dalam hal pemeriksaan, pemanfaatan SIAP telah 100% dikarenakan setiap pemeriksaan pada Perwakilan Provinsi Lampung telah didorong dengan penggunaan





- Aplikasi SIAP, SMP dan SIPTL untuk setiap kegiatan administrasi setelah pemeriksaan seperti kodering temuan, IHPS, TLRHP, juga untuk pemantauan kerugian daerah;
- b. Dalam hal non pemeriksaan, pemanfaatan portal juga dilaksanakan untuk mengupload kegiatan administrasi kegiatan perwakilan, pemanfaatan SiSDM yang menunjang profil SDM individu, dan pemanfaatan email BPK yang terkoneksi dengan jasmin juga telah dilaksanakan.
10. Tingkat efisiensi pada IKU 10 adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan, sebagai berikut:
- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pasca aktivitas kegiatan *best practice* (BP) yang telah disusun dengan tanpa biaya. BPK Perwakilan Provinsi Lampung memaksimalkan potensi yang ada dan yang belum dikembangkan menjadi sumbangan BP seperti e-LHKASN dan WA *Hotline*;
  - b. Efisiensi juga dilakukan dengan adanya *peer review* dimana kegiatan tersebut tidak membutuhkan penganggaran yang sulit. Kegiatan *peer review* dilaksanakan di kantor pada jam kantor selayaknya IHT ataupun KTF dengan forum yang lebih kecil;
  - c. Pelaksanaan Diklat LKPD secara daring dan mempertimbangkan pemeriksa dan penunjang yang masih mampu melakukan pemeriksaan sehingga efisiensi dilakukan dengan mengakomodir peserta diklat dengan kebutuhan dalam penyusunan tim pemeriksaan;
  - d. Mentoring CPNS juga dilaksanakan dengan melakukan efisiensi kegiatan mentoring yang *online* dengan *coach* dan hasil output mentoring yang akan membantu kegiatan pada perwakilan.
11. Tingkat efisiensi pada IKU 11 adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan Ikut dalam pelaksanaan survei kepuasan antara BPK dengan pihak eksternal secara *online*. Penggunaan survei online tersebut dapat memangkas waktu, biaya dan lebih tepat sasaran.
12. Tingkat efisiensi pada IKU 12 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah melaksanakan diklat secara mandiri dan daring yang telah disetujui oleh Badan



Diklat PKN. Manfaat penerapan diklat secara daring antara lain penghematan anggaran atas perjalanan dinas dan belanja barang.

13. Tingkat efisiensi pada IKU 13 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan menggunakan aplikasi SAKTI dari pembuatan SPP hingga SP2D serta realisasi yang telah terjadi (dengan mengupload dokumen) dan aplikasi Prisma untuk pencatatan output dan realisasi pada perwakilan. Penggunaan aplikasi tersebut selain mempermudah pelaporan secara BPK perwakilan dan BPK keseluruhan, juga sebagai efisiensi proses kerja dalam hal *paperless* dan waktu.

## E. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2022 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan non-pemeriksaan sebesar Rp22.429.973.000,00 terdiri dari meningkatnya pemeriksaan berkualitas sebesar Rp8.912.393.000,00 dan meningkatnya layanan pemeriksaan sebesar Rp13.517.580.000. Namun sepanjang tahun 2022 terjadi beberapa revisi anggaran yang akhirnya total anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung bertambah menjadi Rp25.178.284.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.937.746.993,00 atau 99,04%.

**Tabel 3.19. Realisasi Anggaran selama Tahun 2019-2021**

Dalam (ribuan)								
2020			2021			2022		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
22.892.809,00	21.717.234,00	94,86	25.349.610,00	25.175.895,00	99,31	25.178.284,00	24.937.746,00	99,04

Berdasarkan tabel 3.19 diketahui bahwa persentase realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 99,04. Kondisi tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,31%. Namun penurunan tersebut juga berasal dari turunnya total anggaran yang mencapai Rp171.326 juta. Penggunaan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung tersebut menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi. Kegiatan-kegiatan yang dihasilkan juga akan dinilai secara output dan kinerjanya. Penjelasan atas analisis realisasi anggaran per indikator kinerja disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.20. Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	DIPA/PROGRAM/KELURAN/SUB KELURAN/KOMPONEN	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (%)	REALISASI RINCIAN OUTPUT	PENGARUH KEPADA IKU
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA</b>	<b>9.987.050.194</b>	<b>99,03%</b>		Keseluruhan pelaksanaan Kinerja Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran - <b>IKU 8 dan IKU 13</b>
1	RUMUSAN BAHAN PENDAPAT	4.050.000	100,00%	1	
2	LAYANAN MANAJEMEN PEMERIKSAAN	303.853.575	99,83%	12	
3	SUMBANGAN IHPS	90.001.220	99,96%	2	
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh KAP Untuk Dan Atas Nama BPK	985.111.494	100,00%	2	
5	LHP BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG	5.462.175.314	99,31%	27	- IKU 1, IKU 2, IKU 4, dan IKU 6
6	LHP INTERIM BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG	2.675.937.303	98,33%	27	
7	LHP ATAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	148.728.588	99,94%	147	
8	LAPORAN PEMANTAUAN BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG	309.392.700	96,42%	64	- IKU 3
9	LAPORAN PROFIL ENTITAS	7.800.000	76,51%	16	
<b>B</b>	<b>PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA</b>	<b>14.950.696.799</b>	<b>99,06%</b>		Keseluruhan pelaksanaan Kinerja Kegiatan dan Kinerja Anggaran - <b>IKU 8 dan IKU 13</b>
1	LAYANAN MANAJEMEN INTERNAL PERWAKILAN	1.208.181.113	96,20%	20	
	Layanan Hukum Perwakilan	122.819.474	95,30%		
	Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	563.957.602	95,38%		
	Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan	156.013.366	94,24%		- IKU 10 dan IKU 12
	Layanan Keuangan Perwakilan	179.757.534	97,49%		
	Layanan Umum Perwakilan	185.633.137	99,89%		
2	LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	187.520.000	99,05%	25	
3	LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	96.500.000	100,00%		



No.	DIPA/PROGRAM/KELUARAN/SUB KELURAN/KOMPONEN	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (%)	REALISASI RINCIAN OUTPUT	PENGARUH KEPADA IKU
4	<b>LAYANAN PERKANTORAN</b>	<b>13.458.495.686</b>	<b>99,31%</b>	<b>1</b>	
	Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	<b>316.185.073</b>	<b>100,00%</b>		
	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	<b>38.400.000</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>- IKU 11</b>
	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	<b>9.555.827.900</b>	<b>99,10%</b>		
	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	<b>213.104.000</b>	<b>100,00%</b>		
	Layanan Perkantoran Bidang Umum Dan TI	<b>3.334.978.713</b>	<b>99,82%</b>		
	<b>JUMLAH REALISASI</b>	<b>24.937.746.993</b>	<b>99,04%</b>		

\*Penjelasan realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran terdapat pada Subbab Capaian Kinerja.

## F. INOVASI

BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2022 telah membuat inovasi yang dimasukkan sebagai *best practice*. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK nomor 757/ND/XII.1/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal penyampaian hasil penilaian atas usulan dan replikasi *best practice* dan nomor 53/ND/XII.1/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal penyampaian hasil penilaian atas usulan dan replikasi *best practice*. Usulan *best practice* BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah diakui sebagai capaian indikator kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2022 pada satuan kerja. *Best Practice* BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah diakui Tim Kurasi *Best Practice*, adalah WA *Hotline* dan e-LHKASN.

## G. PENGHARGAAN

BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2022 telah menerima sejumlah penghargaan baik secara internal dan eksternal. BPK Perwakilan Provinsi Lampung menerima Penghargaan Satker Terbaik Dalam Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 sebagai juara ketiga pada kategori satuan kerja BPK perwakilan. Tidak hanya itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga menerima penghargaan dari penyelenggara eksternal sebanyak empat. Berikut kami sajikan penghargaan yang telah diterima BPK Perwakilan Provinsi Lampung.



Tabel 3.21 Penghargaan yang Diterima dari Pihak Eksternal

No.	Nama Penghargaan	Uraian	Nama Penyelenggara
1	UBL Awards	<i>Institution with Great Impacts</i> , Dies Natalis ke-50 Universitas Bandar Lampung 1972-2022	Universitas Bandar Lampung
2	Anugerah Reksa Bandha (Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara) terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Tahun 2022	Peringkat 3	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
3	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022	Badan Publik yang Patuh Menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Lampung
4	Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022	Memperoleh Predikat Menuju WBK	Kementerian PANRB



## BAB 4





## PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja juga tidak terlepas dari pelaksanaan Renstra BPK 2020 – 2024. Capaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2022. Pencapaian skor kinerja Tahun 2022 sebesar 100,54 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan skor kinerja sebesar 100,56.

Komitmen yang kuat BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk mencapai kinerja yang maksimal pada capaian indikator kinerja sebanyak enam IKU, antara lain:

1. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, capaian sebesar 105,00;
2. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, capaian sebesar 100,05;
3. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP, capaian sebesar 102,43;
4. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, capaian sebesar 105,00;
5. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, capaian sebesar 105,00;
6. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran, capaian sebesar 101,11.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target terdapat dua IKU, sebagai berikut:

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, capaian sebesar 89,41;
2. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, capaian sebesar 94,40.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yakni:

1. IKU 1, pencapaian terhambat dikarenakan masih adanya kurang konsistensi dan akurasi atas setiap LHP (semester 1) yang telah diserahkan.



2. IKU 7, pencapaian terhambat dikarenakan nilai target yang ditetapkan ke perwakilan sebesar 5,00 yang berarti nilai-nilai dasar telah dimengerti 100% oleh pegawai. Namun pada kenyataan hasil survey hanya mencapai 4,72, walaupun ada peningkatan dari tahun 2021 sebesar 3,80. Hal ini disebabkan, masih kurangnya optimalisasi program BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas peningkatan pengetahuan nilai-nilai dasar pegawai.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang unit/satuan kerja akan melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Untuk IKU yang masih dibawah target selama tahun 2022, dengan cara:
  - a. IKU 1, meningkatkan:
    - 1) Pengujian kualitas berupa konsistensi kalimat dan akurasi angka KHP oleh masing-masing tim pemeriksa;
    - 2) Pengujian konsistensi kalimat oleh Tim *Checker* Perwakilan.
  - b. IKU 7, meningkatkan nilai-nilai dasar pada setiap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Peningkatan dilakukan dengan cara supervisi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK, budaya kerja, dan kode etik serta gratifikasi. Salah satu program BPK Perwakilan Provinsi Lampung yaitu sarana WA grup yang setiap hari menyampaikan dan mengingatkan nilai-nilai dasar BPK dengan sapaan “Tabik Pun” serta optimalisasi program *honest for your honor*.
2. BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya untuk setiap indikator kinerja agar dapat memahami, mengidentifikasi faktor penyebab tercapainya/tidak tercapainya target kinerja, melakukan perbaikan dan inovasi serta memberikan solusi yang nyata dapat dilakukan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPK RI yang independen, berintegritas, dan profesional.



BPK Perwakilan Provinsi Lampung

# LAMPIRAN



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CSFA.  
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Lampung

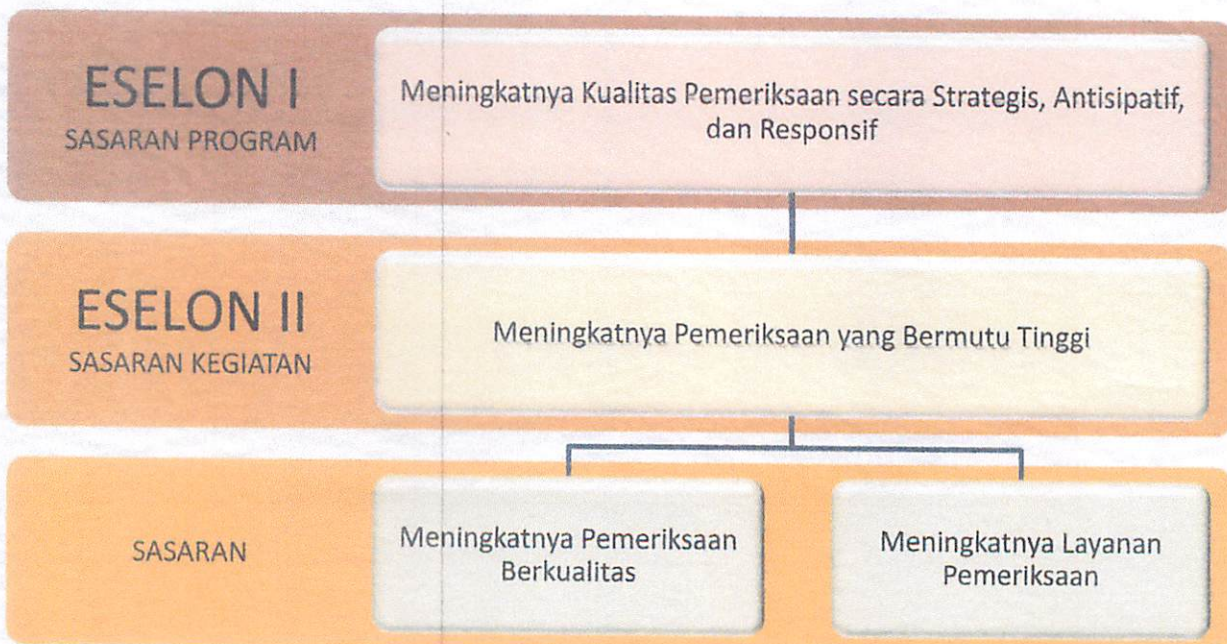
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.  
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.





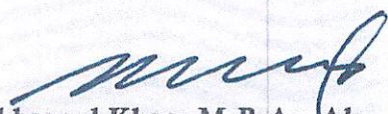
## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2022

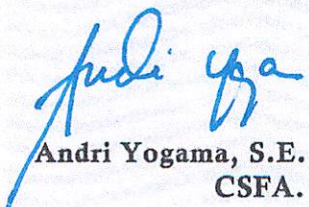
Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	Rp22.429.973.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp8.912.393.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp13.517.580.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Januari 2022

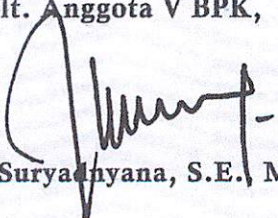
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE.,**  
**CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.**


  
**Andri Yogama, S.E., M.M., Ak.,**  
**CSFA.**


Diketahui oleh:  
Plt. Anggota V BPK,

  
**Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.**

Wakil Ketua BPK,

Ketua BPK,

  
**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,**  
**CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.**

  
**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,**  
**CFrA., CGCAE., QGIA.**



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

**Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Lampung**  
**Tahun : 2022**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan interim atas laporan keuangan (16 entitas) dan pemeriksaan pendahuluan kinerja (1 entitas) sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan Tim Reviu Perwakilan</li> <li>Melaksanakan QC dari PT, WPJ dan PJ melalui supervisi, reviu laporan mingguan dan QA diskusi dengan Tim Reviu Perwakilan atas permasalahan yang ditemukan di pemeriksaan interim/pendahuluan.</li> <li>Melakukan pembelajaran off-class bagi pemeriksa dari KAP yang akan melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK</li> <li>Melaksanakan peningkatan kapasitas pemeriksa melalui diklat, workshop, In house training, dan KTF</li> </ul> Triwulan II:



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelaksanaan QC berjenjang dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 16 entitas dan pemeriksaan kinerja atas 1 entitas</li> <li>Melaksanakan QA berupa reviu atas konsep LHP 17 entitas oleh Tim Reviu Perwakilan</li> <li>Melaksanakan pengujian kualitas KHP oleh masing-masing tim pemeriksa</li> <li>Melaksanakan pengujian akurasi angka dan kalimat oleh Tim Checker Perwakilan</li> <li>Melaksanakan QA oleh PSP atas pemeriksaan Semester I</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan peningkatan kapasitas pemeriksa melalui diklat, workshop, IHT dan KTF</li> <li>Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja, PDDT dan LKPD</li> <li>Melaksanakan QC berjenjang melalui supervisi, reviu laporan mingguan dan QA diskusi permasalahan dengan Tim Reviu Perwakilan</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelaksanaan QC berjenjang dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci kinerja dan PDDT</li> <li>Melaksanakan QA reviu atas konsep LHP oleh Tim Reviu Perwakilan</li> <li>Melaksanakan pengujian kualitas KHP oleh masing-masing tim pemeriksa</li> <li>Melaksanakan pengujian akurasi angka dan kalimat oleh Tim Checker Perwakilan</li> <li>Melaksanakan QA oleh PSP atas pemeriksaan Semester II</li> </ul>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2022 dengan memperhatikan Renstra BPK dan kebijakan AKN V;</li> <li>Pemberi Tugas Pemeriksaan menyatakan secara tertulis dan jelas Harapan Penugasan pemeriksaan yang dituangkan pada P2;</li> <li>Pengendali Teknis meningkatkan reviu kesesuaian Program Pemeriksaan dengan Harapan Penugasan</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2022 dengan harapan penugasan;</li> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2022.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberi Tugas Pemeriksaan menyatakan secara tertulis dan jelas Harapan Penugasan pemeriksaan yang dituangkan pada P2 ;</li> <li>• Pengendali Teknis meningkatkan reviu kesesuaian Program Pemeriksaan dengan Harapan Penugasan</li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2022 dengan harapan penugasan;</li> <li>• Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023</li> </ul>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya pada saat melakukan pemeriksaan LKPD dan Kinerja (LFAR)</li> <li>• Mengidentifikasi kesulitan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas melalui aplikasi SIPTL</li> <li>• Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK yang belum ditindaklanjuti dan melakukan analisa;</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat dan Satuan Pengawas Internal BUMD;</li> <li>• Mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti sesuai hasil koordinasi;</li> <li>• Melaksanakan pemantauan pelaksanaan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>• Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK oleh entitas melalui aplikasi SIPTL</li> <li>• Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	20%	70%	70%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merevui RKP untuk melihat ketersediaan anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;</li> <li>Memetakan profil dan ketersediaan pemeriksa;</li> <li>Melakukan pemetaan entitas pemeriksaan berdasarkan RPJMD atau data keuangan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti rapat koordinasi pemeriksaan tematik nasional</li> <li>Memastikan ketersediaan anggaran di perwakilan</li> <li>Menyusun tim pemeriksaan tematik nasional</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional;</li> <li>Mengikuti rapat koordinasi perkembangan pemeriksaan tematik nasional.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik nasional.</li> <li>Menyusun LHP pemeriksaan terinci tematik nasional</li> <li>Mengikuti rapat koordinasi evaluasi pemeriksaan tematik nasional.</li> </ul>
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan;</li> <li>Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan;</li> <li>Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan;</li> <li>Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan;</li> <li>Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja	100%	20%	70%	70%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun RKP dengan mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal;</li> <li>Memetakan profil dan ketersediaan pemeriksa;</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dalam Pemeriksaan Tematik Lokal							<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan entitas pemeriksaan berdasarkan RPJMD atau data keuangan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti rapat koordinasi pemeriksaan tematik lokal;</li> <li>Memastikan ketersediaan anggaran di perwakilan;</li> <li>Menyusun tim pemeriksaan tematik lokal.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik lokal;</li> <li>Mengikuti rapat koordinasi perkembangan pemeriksaan tematik lokal.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik lokal;</li> <li>Menyusun LHP pemeriksaan terinci tematik local;</li> <li>Mengikuti rapat koordinasi evaluasi pemeriksaan tematik lokal.</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani Pakta Integritas Tahun 2022;</li> <li>Membuat hotline perwakilan lampung dan menginformasikan ke pemda;</li> <li>Membuat daftar data pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan dan/atau hubungan kepentingan dengan personil kunci entitas pemeriksaan;</li> <li>Monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD;</li> <li>Menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Independensi sebelum penugasan pemeriksaan interim/pendahuluan;</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan kepada pemeriksa terkait IIP sebelum, dan selama penugasan pemeriksaan;</li> <li>Kepala Perwakilan meminta KDH dan jajaran ikut menjaga IIP pemeriksa BPK;</li> <li>Membuat surat tugas pemeriksaan dengan pesan terkait IIP pada bagian footer;</li> <li>Supervisi berjenjang dengan mengingatkan untuk selalu melaksanakan nilai-nilai dasar BPK;</li> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK, budaya kerja, dan kode etik serta gratifikasi;</li> </ul> <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Independensi sebelum penugasan pemeriksaan terinci;</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan kepada pemeriksa terkait IIP sebelum, dan selama penugasan pemeriksaan, termasuk pemeriksa dari KAP;</li> <li>Membuat surat tugas pemeriksaan dengan pesan terkait IIP pada bagian footer;</li> <li>Supervisi berjenjang dengan mengingatkan untuk selalu melaksanakan nilai-nilai dasar BPK;</li> <li>Evaluasi dari Pemberi Tugas Pemeriksaan terhadap pelaksanaan nilai-nilai dasar BPK atas penugasan pemeriksaan</li> </ul>
								<p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Independensi sebelum penugasan pemeriksaan interim/pendahuluan;</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan kepada pemeriksa terkait IIP sebelum, dan selama penugasan pemeriksaan;</li> <li>Membuat surat tugas pemeriksaan dengan pesan terkait IIP pada bagian footer;</li> <li>Supervisi berjenjang dengan mengingatkan untuk selalu melaksanakan nilai-nilai dasar BPK</li> </ul>
								<p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Independensi sebelum penugasan pemeriksaan terinci;</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan kepada pemeriksa terkait IIP sebelum, dan selama penugasan pemeriksaan;</li> <li>Membuat surat tugas pemeriksaan dengan pesan terkait IIP pada bagian footer;</li> <li>Supervisi berjenjang dengan mengingatkan untuk selalu melaksanakan nilai-nilai dasar BPK;</li> <li>Evaluasi dari Pemberi Tugas Pemeriksaan terhadap pelaksanaan nilai-nilai dasar BPK atas penugasan pemeriksaan</li> <li>Menerima hasil survei pengukuran tingkat pemahaman seluruh pegawai BPK Perwakilan Lampung terhadap visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BPK</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember	<p>Triwulan I s.d. IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti rekomendasi ITAMA atas reviu yang dilakukan perwakilan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TWII	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97%	97%	97%	97%	Desember	Triwulan I sd. IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan internalisasi oleh Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan layanan Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dhi, meliputi aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal <i>e-Audit</i>, SiPTL, SIKAD, dan penggunaan <i>Big Data Analytics</i>) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan (a.l. Portal BPK, JDIH, Kelola tugas, Jasmin, dsb)</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	12,5%	25%	50%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat dijadikan sebagai usulan sebagai manajemen pengetahuan (<i>Best Practice</i>)</li> <li>Melaksanakan kegiatan Manajemen Pengetahuan (Diklat SiAP LKPD TA 2021)</li> </ul> <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan replikasi <i>Best Practice</i></li> <li>Mengimplementasikan penerapan <i>Best Practice</i></li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa <i>mentoring</i> CPNS</li> </ul> <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa <i>mentoring</i> CPNS</li> <li>Melaksanakan kegiatan Manajemen Pengetahuan (replikasi <i>Best Practice</i>)</li> </ul> <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa KTF (daring)</li> </ul>
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima survei/<i>feedback</i> terkait kualitas hubungan Kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan</li> <li>Melakukan perbaikan berdasarkan Laporan Hasil Survei terkait Efektivitas dan kualitas hubungan, Kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembang an Kompetensi	100%	0%	65%	70%	72%	75%	78%	80%	82%	84%	90%	96%	100%	Desember	Januari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2021</li> </ul> Februari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> Maret : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> April : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> Mei : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> Juni : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> Juli : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan KTF untuk pegawai sesuai ND dari Biro SDM.</li> <li>• Melaksanakan KTF untuk pemeriksa</li> </ul> Agustus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> September : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> Oktober : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)
												<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> November : <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul> Desember : <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Melaksanakan diklat untuk pegawai</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%		88%		88%		88%			Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2021</li> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran</li> <li>Menyusun data capaian output.</li> </ul> Triwulan II s.d. IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi dalam rangka pelaksanaan tasi pemeriksaan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung.</li> <li>Melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) DIPA</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi dalam rangka pelaksanaan tasi pemeriksaan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung.</li> <li>Melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) DIPA</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi dalam rangka pelaksanaan tasi pemeriksaan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung.</li> <li>Melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) DIPA</li> </ul>

**Keterangan:**

- Kolom (1) : *Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja.*
- Kolom (2) : *Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja.*
- Kolom (3) : *Diisi dengan Target Tahun 2022*
- Kolom (4) s.d. (7) : *Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis unit/satuan kerja dan juga target tahunan.*
- Kolom (8) : *Diisi dengan rencana waktu penyelesaian.*
- Kolom (9) : *Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.*  
*Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada triwulan I, II, III dan IV. Unit/satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai.*  
***Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan direncanakan setiap triwulan (minimal empat jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang berbeda selama Tahun 2022).***